

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Febri Gustiardi¹⁾, Mukhlizul Hamdi²⁾

Program Study Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: ¹⁾febrigustiardi@gmail.com, ²⁾mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 responden pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumbar. Teknik pengambilan sampel adalah Saturation Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (3) Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dipercaya memiliki kemampuan untuk mengubah situasi pada pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan korup menjadi pemerintah dengan tatanan yang demokratis (Doni et al., 2023). Hasil dari evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pemerintahan selama 2022 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2022 terealisasi 63,14% dengan kategori “B” target yang diharapkan adalah 75,50% (BB). Predikat yang diperoleh menunjukkan hasil B dan memerlukan perbaikan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Hafzhan, 2021). Sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup serangkaian tindakan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan (Septiana, 2020). Sistem pengendalian internal adalah kumpulan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan. digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efisien (Utama, 2020). Sistem pelaporan adalah kumpulan kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan (Hafzhan, 2021).

METODE

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *saturation sampling*. Penelitian ini sampel sebanyak 41. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan kuesioner dengan skala likerts, sedangkan untuk pengujian setiap instrumen, data diolah menggunakan SPSS 25. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah(SAPD), sistem pengendalian internal(SPI), dan sistem pelaporan(SPI) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah(AKIPD). Pada BPKAD SUMBAR, maka dilakukan pengujian dengan analisis regresi linear berganda dengan hasil:

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coef.	Sig	Alpha	Ket
SAPD	0,160	0,161	0,05	Tidak Berpengaruh
SPI	0,320	0,000	0,05	Berpengaruh
SP	0,212	0,167	0,05	Tidak Berpengaruh

Catatan: Adj R-Square 0,658

Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki koefisien 0,160 dengan nilai signifikansi 0,161 yang besar dari 0,05 bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal memiliki koefisien 0,320 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan memiliki koefisien sebesar 0,212 dengan nilai signifikansi 0,167 yang lebih besar dari 0,05 bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh. sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap BPKAD Sumbar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Doni, R. A., Sukraini, J., Defitri, S. Y., Yeni, A., Sriyanti, E., & N. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. 7(2), 327–333. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JUMBO>
- [2] Hafzhan, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerinatah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JI> E <http://article/view/3845%0Ahttp://dspace.u.c.ac.id/handle/123456789/1288>
- [3] Septiana, P. I. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Teknologi Imformasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten). *Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten*, 5(2), 40–51
- [4] Utama, D. P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun.